

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN: 1907-2902 (Print)

e-ISSN: 2502-8537 (Online)

ANALISIS KETIMPANGAN GENDER DI PROVINSI SUMATERA BARAT

(GENDER INEQUALITY ANALYSIS IN WEST SUMATERA PROVINCE)

Rita Diana

BPS Provinsi Sumatera Barat

Korespondensi penulis: rita.diana@bps.go.id

Abstract

The issue of women empowerment has been a critical development agenda, both in national dan international level. However, it would be difficult for women to be empowered if gender inequality still exists in essential aspects in development processes. This article aims to find out regencies/municipalities with high gender inequality in West Sumatera Province. This study employed a biplot method to analyze the 2015 Gender Empowerment Index data. Such method categorized regencies and municipalities in West Sumatra into three groups based on the components of gender empowerment. Of the three groups, the first group has prominent characteristics regarding their gender inequality that shown from high gender imbalances concerning women and men as professionals, managers, administrators and technicians and representation in parliament. Meanwhile, the second group features regions with a medium level of women's contribution to income and women's representation in parliament. Furthermore, the third group is attributed to a high proportion of women in parliament. The results from biplot method analysis show of 99.94% and STRESS score of 15.98%. These values indicate that the results are quite similar to the real condition.

Keywords: *biplot method, gender inequality, gender empowerment*

Abstrak

Isu pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda pembangunan penting, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun begitu, kaum perempuan sulit untuk berdaya secara optimal jika ketimpangan gender masih ditemui pada aspek-aspek penting dalam proses pembangunan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kabupaten/kota yang memiliki tingkat ketimpangan gender tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Kajian ini menggunakan metode biplot untuk menganalisis data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2015. Metode ini mengategorikan kabupaten/kota di Sumatera Barat menjadi tiga kelompok berdasarkan variabel-variabel pembentuk IDG. Dari ketiga kelompok tersebut, kelompok pertama memiliki karakteristik yang menonjol yaitu masih tingginya ketimpangan gender dalam hal kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, teknisi, serta keterwakilan dalam parlemen. Sementara itu, kelompok kedua dicirikan dengan sumbangan perempuan dalam pendapatan dan keterwakilan perempuan dalam parlemen yang tergolong kategori sedang. Selanjutnya, kelompok ketiga memiliki kekhasan yaitu tingginya keterwakilan perempuan dalam parlemen. Hasil analisis dengan menggunakan metode biplot menunjukkan variabilitas sebesar 99,94% dan nilai STRESS sebesar 15,98%. Nilai ini mengindikasikan bahwa hasil kajian ini cukup cocok dengan kondisi sebenarnya.

Kata Kunci: metode biplot, ketimpangan gender, pemberdayaan gender

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan persoalan klasik yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan (Tuwo, 2016). Menurut UN Women (2016), persoalan kesetaraan gender tidak hanya terjadi di satu daerah atau wilayah, tetapi juga berlangsung hampir di setiap bagian dunia, termasuk di negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat, kemajuan perempuan dalam partisipasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik sangat lambat selama 20 tahun terakhir. Lebih lanjut, UN Women (2016) menyatakan bahwa jika kondisi seperti ini masih terjadi, maka untuk mencapai kesetaraan gender antara pria dan wanita di Asia-Pasifik membutuhkan waktu 118 tahun. Rendahnya kesetaraan gender sudah menjadi hal lazim di wilayah Asia Pasifik. Lebih menyedihkan lagi, isu tersebut sulit terselesaikan karena lembaga-lembaga pemerintah yang diberi tanggung jawab menangani kesetaraan perempuan tidak memiliki dana yang cukup (UN Women, 2016). Hambatan utama hal ini adalah kurangnya investasi. Oleh sebab itu, pemerintah dan setiap pemangku kepentingan perlu memberikan perhatian lebih untuk menangani masalah ini. Untuk menangani permasalahan kesetaraan gender, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah perlu memperhatikan masalah ini. Dengan demikian, usaha peningkatan pemberdayaan dan pembangunan gender dapat terlaksana dengan baik (UN Women, 2016).

World Economic Forum (WEF) telah merancang sistem untuk menunjukkan pentingnya kesetaraan gender bagi pertumbuhan dan perkembangan negara. Sistem bernama *Global Gender Gap* tahun 2015 mengurutkan 145 negara berdasarkan besarnya kesenjangan di bidang pendidikan, kesehatan, politik, kekuasaan, dan ekonomi. Dalam laporan tersebut, lima negara dengan kesetaraan gender paling rendah adalah Iran, Chad, Suriah, Pakistan, dan Yaman. Sementara itu, Indonesia berada di posisi ke-92, satu peringkat di bawah Tiongkok dan di atas Uruguay (WEF, 2015).

Dalam konteks pemberdayaan dan pembangunan gender, Katjasungkana dalam Nugroho (2008) mengemukakan empat indikator pemberdayaan dan pembangunan gender, yang meliputi (i) akses, mencakup kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan; (ii) partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut; (iii) kontrol, mencakup kesempatan yang sama bagi lelaki dan perempuan untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut; dan (iv) manfaat, yaitu lelaki dan perempuan harus dapat menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Isu gender menarik banyak perhatian karena tidak saja menyangkut aspek psiko-sosiologis, tetapi juga berkaitan dengan aspek teologis. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Setiap orang memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, memiliki akses berarti setiap orang mempunyai peluang/kesempatan dalam memperoleh akses yang adil dan setara terhadap sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sementara itu, memiliki kesempatan berpartisipasi berarti mempunyai kesempatan untuk berkreasi atau ikut andil dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Kesetaraan gender dapat pula dianggap sebagai cara pintar untuk mengatur perekonomian. Hal ini disebabkan kesetaraan gender akan memberikan akses bagi para wanita untuk turut berkontribusi dalam pergerakan ekonomi suatu bangsa. Akibatnya, pergerakan ekonomi akan semakin efektif dan wanita juga lebih dihargai perannya.

Pada tahun 2015, negara-negara anggota PBB telah menyepakati deklarasi untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Konsep SDGs ini merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* atau MDGs) yang juga menetapkan isu gender menjadi salah satu agenda pembangunan. Evaluasi capaian kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dapat dilihat melalui indikator-indikator yang menunjukkan capaian-capaian pembangunan berbasis gender, berupa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Tiga komponen pada IDG meliputi keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional,

manajer, administrasi, dan teknisi; serta sumbangan pendapatan perempuan (KPPA & BPS, 2016).

Tren IDG Sumatera Barat sejak tahun 2010 hingga 2013 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010, IDG Sumatera Barat sebesar 63,04 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan mencapai 65,40. Namun, IDG Sumatera Barat mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 61,86 dan naik kembali menjadi 64,06 pada tahun 2015. Angka ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan IDG nasional sebesar 70,83 (KPPA & BPS, 2016)

Penurunan IDG Sumatera Barat di tahun 2014 dipengaruhi oleh penurunan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Pada tahun 2013, keterwakilan perempuan Sumatera Barat dalam parlemen sebesar 12,73%. Namun, proporsi ini menurun menjadi 9,23% pada tahun 2014 dan 10,77% pada tahun 2015 (KPPA & BPS, 2016) Kondisi ini tidak sejalan dengan agenda pembangunan RPJMN 2014-2019 yang salah satu sasarannya adalah peningkatan peranan dan keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sasaran ini pun sudah tertera dalam Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Aturan ini menyatakan bahwa kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sekurang-kurangnya 30%. Sayangnya, kuota ini belum tercapai di Provinsi Sumatera Barat. Jika kuota perempuan yang diatur dalam UU tersebut mampu dicapai secara optimal tentu akan berdampak dalam pemberdayaan perempuan, mengingat kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih memperhatikan isu-isu gender.

Komponen pengukuran IDG yang kedua adalah persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, kepemimpinan, dan teknisi. Indikator ini menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintah, serta kehidupan ekonomi dan sosial. Pada tahun 2015, persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Sumatera Barat relatif besar, yakni mencapai 56,75% (KPPA & BPS, 2016). Hal ini menandakan bahwa keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam perekonomian semakin bisa disejajarkan dengan laki-laki.

Penduduk Provinsi Sumatera Barat berusia 15 tahun ke atas terdiri dari 1,79 juta jiwa penduduk laki-laki (49,20%) dan 1,85 juta jiwa penduduk perempuan (50,80%). Namun, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki di Provinsi Sumatera Barat masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan di

wilayah ini. Hal ini menggambarkan bahwa kesempatan perempuan dalam dunia kerja masih jauh tertinggal dari laki-laki. Situasi ini dapat disebabkan karena mayoritas perempuan usia kerja mengurus rumah tangga sehingga tidak berkategori sebagai penduduk yang potensial dalam pasar tenaga kerja. Persentase perempuan yang bekerja adalah 37% dari keseluruhan tenaga kerja. Dapat dikatakan, laki-laki masih mendominasi tenaga kerja Sumatera Barat. Hal ini juga berdampak pada sumbangan pendapatan perempuan yang hanya mencapai 36,40% (KPPA & BPS, 2016).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan gender yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Ketimpangan dilihat berdasarkan kabupaten-kabupaten yang terdapat di wilayah provinsi tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas kabupaten/kota mana yang memiliki tingkat ketimpangan paling tinggi dapat dilakukan analisis statistika mendalam. Analisis didasarkan pada data sekunder IDG tahun 2015 (KPPA & BPS, 2016).

METODOLOGI

Studi ini menggunakan data IDG yang memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Kajian ini mengolah komponen IDG di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari variabel X_1 = keterlibatan perempuan di parlemen (%); X_2 = perempuan sebagai tenaga profesional (%), dan X_3 = sumbangan pendapatan perempuan (%).

Data IDG tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh gambaran umum tentang kondisi pemberdayaan gender kabupaten/kota di Sumatera Barat. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode biplot. Metode biplot adalah metode statistika yang berguna untuk menyajikan secara simultan n obyek pengamatan dan p peubah dalam ruang bidang datar, sehingga ciri-ciri peubah dan obyek pengamatan serta posisi relatif antar obyek pengamatan dengan peubah dapat dianalisis secara visual (Jolliffe, 1986; Rawlings, 1988). Metode ini memungkinkan untuk melakukan *positioning* maupun *perceptual mapping* dari sekumpulan objek. Ada beberapa informasi yang dapat diperoleh dari analisis biplot, antara lain kedekatan antar objek yang diamati, keragaman variabel, hubungan atau korelasi antar variabel, dan nilai variabel pada suatu objek (Aitchison & Greenacre, 2002), seperti yang dijelaskan berikut ini:

a. *Kedekatan antara obyek*

Informasi ini nantinya dijadikan panduan wilayah mana yang memiliki kemiripan karakteristik dengan wilayah lainnya. Tingkat kemiripan atau kedekatan antara wilayah dapat dilihat dari jarak *Euclidean* maupun sudut yang terbentuk antara wilayah-wilayah tersebut.

b. *Keragaman variabel*

Informasi ini nantinya digunakan untuk melihat apakah ada komponen IDG tertentu yang semua nilainya hampir sama untuk setiap wilayah atau sebaliknya nilai IDG setiap wilayah ada yang sangat besar dan kecil. Dengan adanya informasi ini, dapat dilihat komponen-komponen IDG mana yang berpengaruh terhadap IDG ataupun sebaliknya. Dalam biplot, komponen-komponen dengan keragaman yang kecil digambarkan sebagai vektor yang pendek sedangkan komponen-komponen dengan keragaman yang besar digambarkan sebagai vektor yang panjang.

c. *Hubungan korelasi antarvariabel*

Informasi ini digunakan untuk menilai bagaimana komponen yang satu dipengaruhi peubah yang lain. Dengan menggunakan biplot komponen akan digambarkan sebagai garis berarah. Dua komponen yang memiliki korelasi positif tinggi akan digambarkan sebagai dua buah garis dengan arah yang sama, atau membentuk sudut sempit. Sementara itu dua komponen yang memiliki korelasi negatif tinggi akan digambarkan dalam bentuk dua garis dengan arah yang berlawanan, atau membentuk sudut lebar (tumpul). Sedangkan dua komponen yang tidak berkorelasi akan digambarkan dalam bentuk dua garis dengan sudut mendekati 90 derajat (siku-siku).

d. *Nilai-nilai variabel pada suatu obyek*

Informasi ini nantinya digunakan untuk melihat keunggulan dari setiap wilayah jika dilihat dari masing-masing nilai komponen IDG. Wilayah yang terletak searah dengan arah dari suatu komponen IDG, dikatakan bahwa pada wilayah tersebut nilainya di atas rata-rata. Sebaliknya, jika wilayah lain terletak berlawanan dengan arah dari komponen tersebut, maka provinsi tersebut memiliki nilai dekat dengan rata-rata.

Kajian ini selanjutnya mengelompokkan 19 kota/kabupaten di Sumatera Barat berdasarkan kedekatan antar-obyek pada *scatter plot* yang telah dibuat. Untuk menguji pembentukan kelompok tersebut, kajian ini selanjutnya menerapkan teknik *multivariate analysis of variance* (MANOVA). Studi ini juga menghitung nilai *standardized residueal sum of square* (STRESS) untuk mengukur ketidakcocokan (*lack of fit error*) antara konfigurasi yang ada dengan

ukuran kesesuaian yang diinginkan. Semakin tinggi nilai STRESS semakin tidak cocok atau semakin mendekati nol maka output yang dihasilkan semakin sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan kata lain, semakin kecil nilai STRESS menunjukkan semakin kecil *error* antara jarak dan nilai kemiripan dari ruang yang disajikan (Cox & Cox, 1994). Nilai STRESS didefinisikan sebagai berikut:

$$\text{Stress} = \left(\frac{\sum_{i,j} (d_{ij} - \hat{d}_{ij})^2}{\sum_{i,j} d_{ij}^2} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

dengan d_{ij} adalah jarak *Euclid* dan \hat{d}_{ij} adalah nilai deviasi hubungan kemonotonan antara jarak d_{ij} dengan dissimilaritas objek yang diobservasi. Pedoman untuk interpretasi STRESS adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria kesesuaian konfigurasi (STRESS)

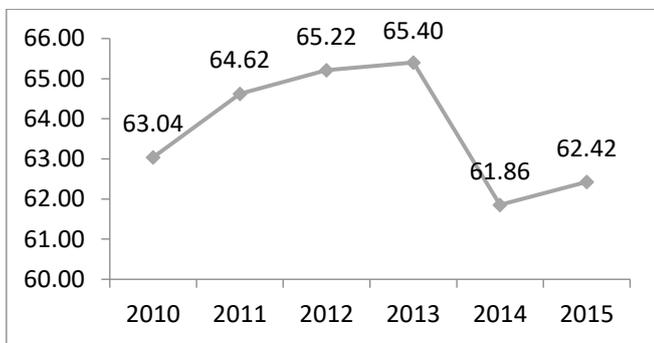
| Nilai STRESS | Kriteria |
|----------------------------------|-------------|
| $\geq 20\%$ | Kurang |
| $10\% \leq \text{STRESS} < 20\%$ | Cukup |
| $5\% \leq \text{STRESS} < 10\%$ | Baik |
| $2,5\% \leq \text{STRESS} < 5\%$ | Sangat Baik |
| $< 2,5\%$ | Sempurna |

GAMBARAN UMUM IDG DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Indikator IDG digunakan untuk menggambarkan persamaan peranan atau pencapaian kapabilitas antara perempuan dan laki-laki dalam aspek ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Ketika terjadi ketimpangan atau ada satu kelompok yang capaian pemberdayaannya jauh di atas yang lain (baik perempuan maupun laki-laki), maka nilai IDG akan jauh dari 100. Kenaikan indikator IDG menggambarkan peningkatan peran perempuan sekaligus pengurangan peran laki-laki. Peningkatan ketimpangan pemberdayaan gender ditunjukkan oleh makin turunnya IDG yang terdiri dari tiga indeks, yakni indeks EDEP (*equally distributed equivalent percentage*) parlemen, indeks kedudukan perempuan sebagai tenaga profesional, dan indeks EDEP pendapatan. Angka indeks yang baik adalah angka yang mendekati 50 atau dengan kata lain kesetaraan gender terjadi apabila partisipasi perempuan dan laki-laki 50:50. Pada saat peran salah satu kelompok di atas 50%, maka terjadi ketimpangan gender. Semua penghitungan indeks komponen IDG menyertakan data proporsi jumlah penduduk perempuan. Ketika terjadi perubahan komposisi, angka indeks komponen akan berubah meskipun indikator komponennya tetap.

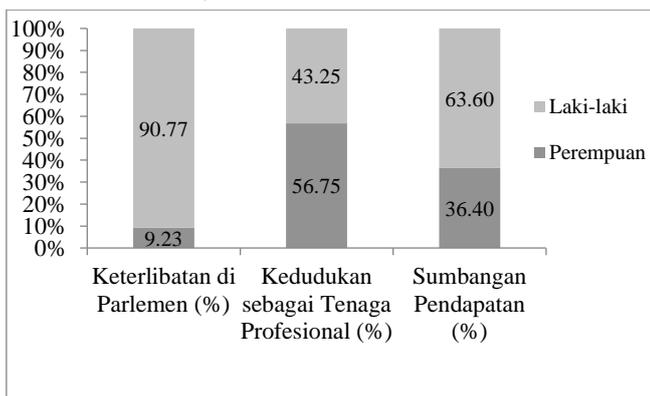
Gambar 1 menunjukkan tren IDG Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Gambar 1. Dapat dicermati bahwa perkembangan IDG Sumatera Barat dari tahun 2010 hingga tahun 2013 terus meningkat, tetapi menurun drastis pada tahun 2014. Hal ini dipicu oleh berkurangnya persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen. Pada tahun 2015, IDG Sumatera Barat mulai menunjukkan arah yang lebih baik sejalan dengan adanya peningkatan persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknisi. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya ketimpangan gender. Meskipun menunjukkan peningkatan IDG, komponen IDG berupa keterwakilan perempuan dalam parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan di Sumatera Barat masih lebih rendah dari laki-laki atau masih di bawah 50% (Gambar 2).

Gambar 1. Tren IDG Sumatera Barat, 2010-2015



Sumber: KPPA & BPS (2016)

Gambar 2. Pencapaian komponen IDG Sumatera Barat, 2015



Sumber: KPPA & BPS (2016)

IDG Sumatera Barat berada pada peringkat ke-27 dari 33 provinsi di Indonesia. Kondisi ini kurang menggembirakan karena menggambarkan tingginya ketimpangan gender di Sumatera Barat dibandingkan dengan provinsi lain. Rata-rata variabel IDG adalah 7,43% untuk keterwakilan perempuan dalam parlemen, 57,12% untuk kedudukan perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, teknisi, dan 34,18% pada sumbangan pendapatan perempuan. Masih

rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen di Sumatera Barat (9,23%) membuat capaian perempuan tetap rendah. Hal ini sejalan dengan masih sedikitnya jumlah anggota DPRD tahun 2015 di Sumatera Barat yakni sebesar 10,77 persen (Tabel 2). Jika mengacu pada UU No.12 Tahun 2003, angka ini masih jauh dari kuota minimal 30% anggota parlemen perempuan.

Tabel 2. Perkembangan jumlah anggota DPRD Sumatera Barat, 2011-2015

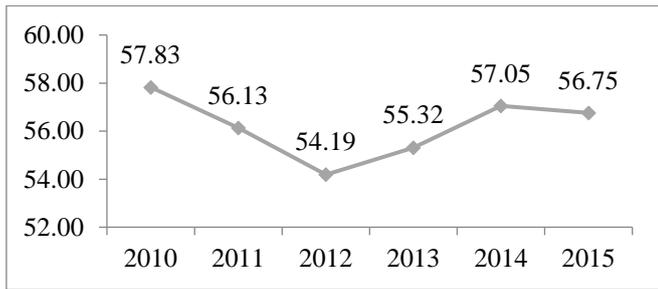
| Tahun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Persentase Perempuan |
|-------|-----------|-----------|--------|----------------------|
| 2015 | 58 | 7 | 65 | 10.77 |
| 2014 | 59 | 6 | 65 | 9.23 |
| 2013 | 48 | 7 | 55 | 12.73 |
| 2012 | 48 | 7 | 55 | 12.73 |
| 2011 | 48 | 7 | 55 | 12.73 |

Sumber: KPPA & BPS (2016)

Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal, baik di tingkat nasional maupun lokal, membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas hidup perempuan. Hal ini dikarenakan kualitas hidup perempuan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga-lembaga politik, termasuk alokasi anggaran untuk pengimplementasiannya. Apabila perempuan tidak ikut serta dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan mereka maka besar kemungkinan perempuan akan ditempatkan pada skala prioritas yang rendah (Noerdin, 2006).

Hal yang cukup menggembirakan dalam perkembangan indikator IDG adalah kedudukan perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi. Meskipun selama tahun 2010 sampai 2015 terjadi penurunan, namun persentasenya masih di atas laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan dan potensi perempuan di Sumatera Barat dalam pengambilan keputusan bidang penyelenggaraan pemerintah, swasta, dan organisasi sosial lainnya lebih baik dibandingkan laki-laki. Namun, angka tersebut masih belum dapat dikatakan sejajar dan justru akan membuat IDG semakin rendah yang akan mengakibatkan semakin tingginya ketimpangan gender. Perkembangan persentase perempuan sebagai tenaga profesional dapat dilihat pada Gambar 3.

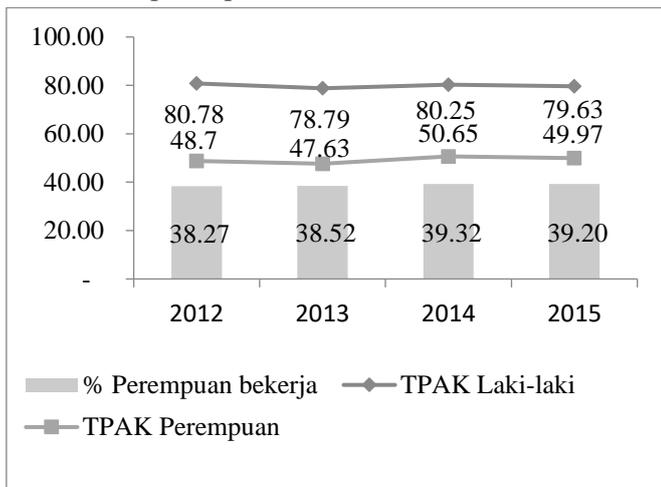
Gambar 3. Perkembangan persentase perempuan sebagai tenaga profesional, 2010-2015



Sumber: KPPA & BPS (2016)

Secara umum, partisipasi perempuan dalam dunia kerja semakin meningkat, walaupun terkadang mengalami fluktuasi. Gambaran perempuan dalam pasar kerja dapat dilihat pada Gambar 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan terlihat stagnan dan kesempatan perempuan dalam dunia kerja masih jauh tertinggal dari laki-laki. Hal ini karena mayoritas perempuan usia kerja mengurus rumah tangga, sehingga tidak masuk kategori sebagai penduduk yang berada dalam pasar tenaga kerja.

Gambar 4. Perkembangan TPAK laki-laki dan perempuan, 2012-2015

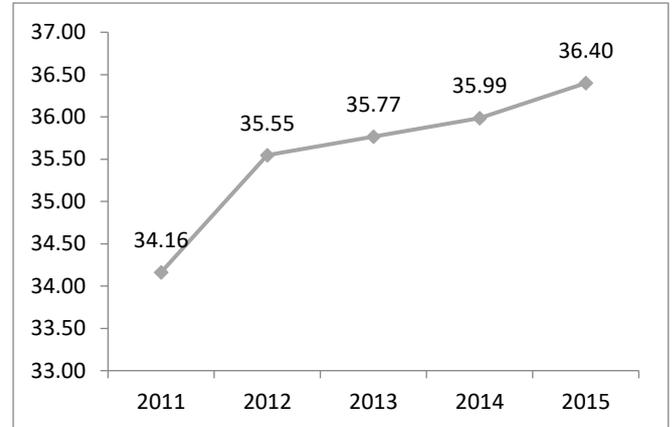


Sumber: KPPA & BPS (2016)

Pengeluaran per kapita (yang disesuaikan) perempuan mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015. Pada tahun 2010, pengeluaran perempuan sebesar 7,73 juta rupiah, dan terus meningkat mencapai 9,80 juta rupiah pada tahun 2015. Namun demikian, jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Perubahan pengeluaran ini terkait dengan faktor angkatan kerja dan upah yang diterima. Selain itu, dominasi penduduk laki-laki pada angkatan kerja di Sumatera Barat berakibat pada sumbangan pendapatan perempuan yang lebih kecil dibanding laki-laki. Jika partisipasi perempuan dalam pasar kerja meningkat, proporsi sumbangan pendapatan perempuan meningkat pula, sehingga berdampak pada makin kecilnya kesenjangan

proporsi sumbangan pendapatan laki-laki dan perempuan. Perkembangan sumbangan pendapatan perempuan dari tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Perkembangan sumbangan pendapatan perempuan, 2011-2015 (persen)



Sumber: KPPA & BPS (2016)

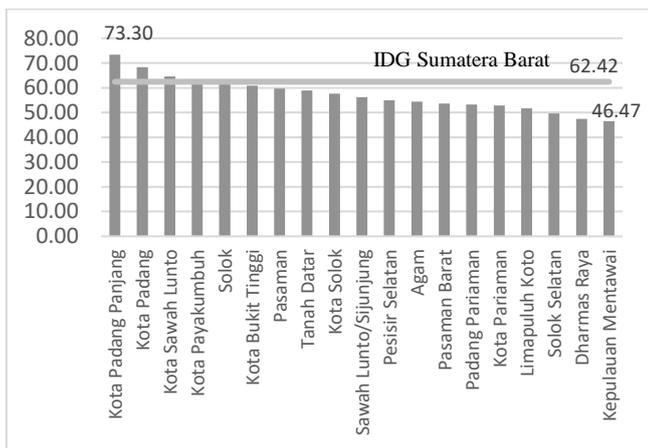
Selain partisipasi kerja, kesenjangan upah/pendapatan juga dapat memengaruhi proporsi sumbangan pendapatan perempuan. Hennigusnia (2014) dengan menggunakan data Sakernas BPS tahun 2008-2012 menjelaskan bahwa kesenjangan upah antargender terjadi karena adanya diskriminasi. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia menetapkan upah dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, tetapi masih ditemukan kurangnya penghargaan terhadap keterampilan perempuan di pasar kerja (Hennigusnia, 2014). Tenaga kerja perempuan juga masih menghadapi tantangan kultural dan struktural yang cenderung memarginalkan posisi perempuan di pasar kerja. Data Sakernas BPS tahun 1980-2012 menunjukkan rata-rata upah yang diterima buruh/karyawan perempuan 30% lebih rendah dibandingkan dengan buruh/karyawan laki-laki (Vibriyanti, 2013).

Keberadaan sebagian besar angkatan kerja perempuan di sektor informal juga turut memengaruhi kesenjangan pendapatan antargender (Vibriyanti, 2013). Selain para angkatan kerja perempuan cenderung tidak tersentuh oleh UU perlindungan tenaga kerja, mereka juga umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan memungkinkan makin lebarnya jurang kesenjangan upah/pendapatan (Pirmana, 2006). Menurut Miki dan Yuval (2011), perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih dapat bersaing di pasar kerja dibanding mereka yang berpendidikan rendah untuk jenis pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Selanjutnya, Wahyuni dan Monika (2016) mengemukakan investasi pada bidang

pendidikan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas angkatan kerja perempuan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi bias gender pada pendapatan.

Gambar 6 mengilustrasikan capaian IDG di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dapat dicermati bahwa ada tiga daerah yang pencapaiannya melebihi IDG Provinsi Sumatera Barat, yakni Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan Kota Sawah Lunto. Sebaliknya, tiga daerah dengan capaian IDG terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmas Raya, dan Kabupaten Solok Selatan. Selain karena ketiga daerah tersebut masih merupakan daerah tertinggal dan daerah pemekaran, indikator IDG yang dimiliki masih jauh dari kesetaraan gender (peran laki-laki dan perempuan masih timpang) sehingga membuat pembangunan gender belum dirasakan oleh masyarakat setempat.

Gambar 6. IDG kabupaten/kota di Sumatera Barat, 2015



Sumber: KPPA & BPS (2016)

Jika dilihat dari perkembangan dalam dua tahun terakhir, terdapat lima kabupaten/kota yang mengalami penurunan capaian IDG. Di antara kelima kabupaten/kota tersebut, penurunan cukup signifikan dialami oleh Kota Solok. Situasi ini utamanya dipengaruhi oleh berkurangnya keterlibatan perempuan dalam parlemen. Sementara itu, kabupaten/kota lain yang mengalami penurunan IDG umumnya disebabkan oleh meningkatnya persentase kedudukan perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi. Kondisi ini membuat disparitas pemberdayaan gender semakin melebar dan IDG semakin turun. IDG tertinggi dicapai oleh Kota Padang Panjang (73,30%)

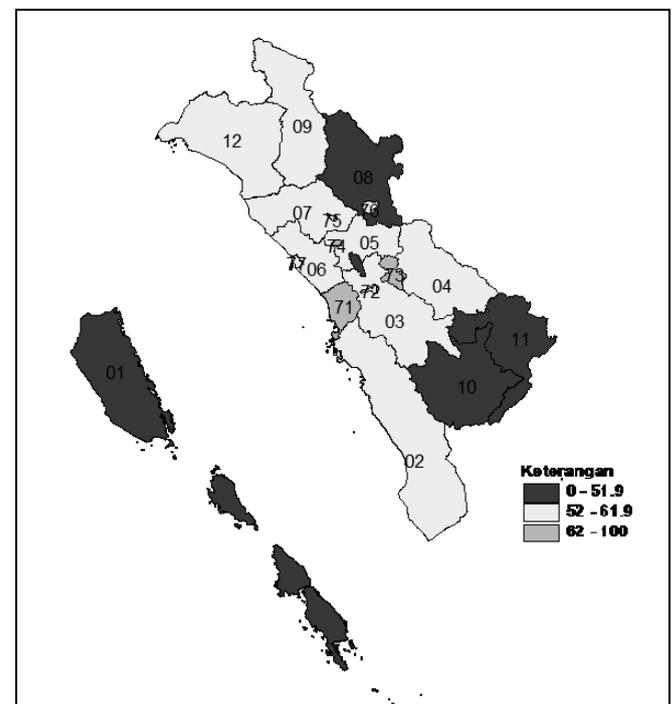
¹ Kode kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat:

01. Kepulauan Mentawai; 02. Pesisir Selatan; 03. Solok; 04. Sijunjung; 05. Tanah Datar; 06. Padang Pariaman; 07. Agam; 08. Lima Puluh Kota; 09. Pasaman; 10. Solok Selatan; 11. Dharmas Raya; 12. Pasaman Barat;

dan IDG terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai (46,47%). Jarak yang ditimbulkan dari perbedaan capaian IDG tertinggi dan terendah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dapat dikatakan, disparitas pembangunan gender di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Barat semakin melebar.

Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat¹ berdasarkan capaian IDG-nya dapat dicermati pada Gambar 7. Kajian ini menggunakan metode *hierarchical cluster* untuk mendapatkan tiga kelompok capaian IDG, yaitu tinggi (IDG 0 – 51,9), sedang (52 – 61,9), dan tinggi (62 – 100).

Gambar 7. Pengelompokan IDG menurut kabupaten dan kota di Sumatera Barat, 2015



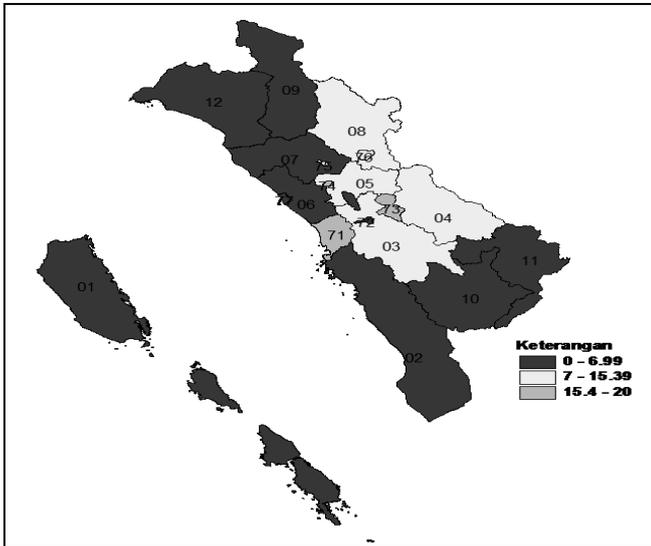
Sumber: Olah data KPPA & BPS (2016)

Selanjutnya, sebaran keterwakilan perempuan di parlemen disajikan pada Gambar 8. Wilayah dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen terendah di Sumatera Barat adalah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan. Sebaliknya, persentase keterwakilan perempuan terbanyak di Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, dan Kota Padang. Namun, secara keseluruhan belum ada kabupaten/kota dengan persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen yang mendekati 30%. Artinya, masih sangat

71. Kota Padang; 72. Kota Solok; 73. Kota Sawahlunto; 74. Kota Padang Panjang; 75. Kota Bukittinggi; 76. Kota Payakumbuh; 77. Kota Pariaman.

sedikit keterwakilan perempuan dalam parlemen di daerah. Bahkan, masih ada kabupaten yang masih belum memiliki keterwakilan perempuan di parlemen.

Gambar 8. Pengelompokan kabupaten/kota di Sumatera Barat menurut keterwakilan perempuan dalam parlemen, 2015



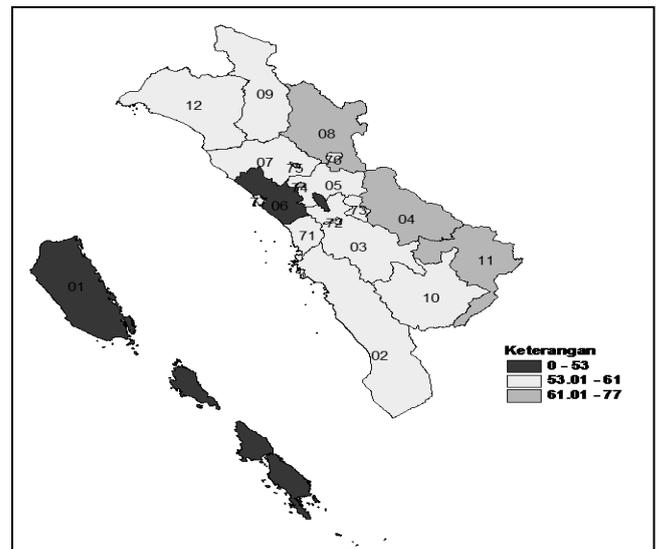
Sumber: Olah data KPPA & BPS (2016)

Gambar 9 memperlihatkan kelompok daerah berdasarkan proporsi penduduk perempuan dengan kedudukan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi. Wilayah dengan proporsi perempuan tertinggi pada jabatan tersebut adalah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmas Raya, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi, dengan persentase di atas 60%. Sementara itu, kelompok daerah dengan capaian terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman (<50%). Kelompok daerah yang memiliki persentase kedudukan perempuan sebagai tenaga profesional antara 50 – 60% adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawah Lunto, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Berdasarkan pengelompokan data tersebut, terlihat bahwa hampir seluruh daerah kabupaten/kota memiliki kedudukan perempuan sebagai tenaga profesional lebih banyak dibanding laki-laki, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Padang Pariaman.

Jika ditinjau dari proporsi sumbangan pendapatan perempuan, kelompok daerah yang memiliki sumbangan pendapatan perempuan terendah (0-35%) adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima

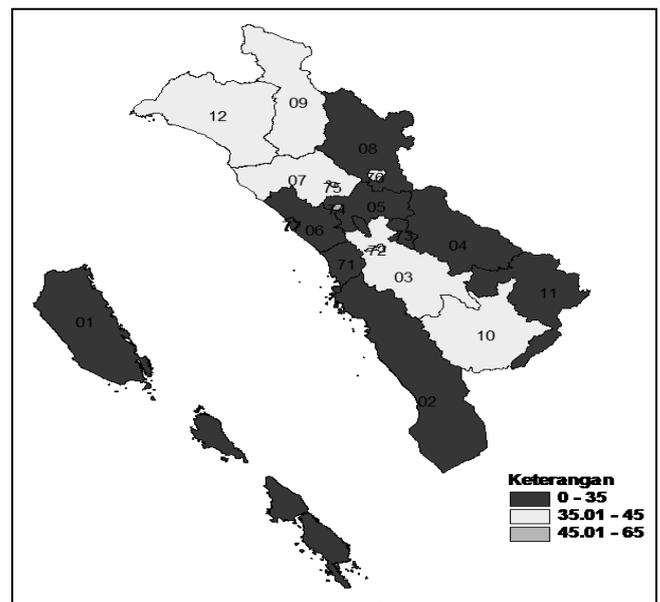
Puluh Kota, Kabupaten Dharmas Raya, Kota Padang, Kota Sawahlunto, dan Kota Pariaman. Sebaliknya, kelompok daerah dengan sumbangan pendapatan tertinggi (>45%) adalah Kota Padang Panjang. Kelompok daerah yang memiliki sumbangan pendapatan perempuan berkisar 35-45% meliputi Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Solok, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh.

Gambar 9. Pengelompokan kabupaten/kota di Sumatera Barat menurut persentase kedudukan perempuan sebagai tenaga profesional, 2015



Sumber: Olah data KPPA & BPS (2016)

Gambar 10. Pengelompokan kabupaten/kota di Sumatera Barat menurut persentase sumbangan pendapatan perempuan, 2015



Sumber: Olah data KPPA & BPS (2016)

Dari hasil analisis ketiga variabel IDG tersebut, kajian ini menemukan bahwa variabel kedudukan perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, teknisi mempunyai variasi yang paling besar dibanding dua variabel lainnya. Nilai variasi dari variabel ini sebesar 39,02.

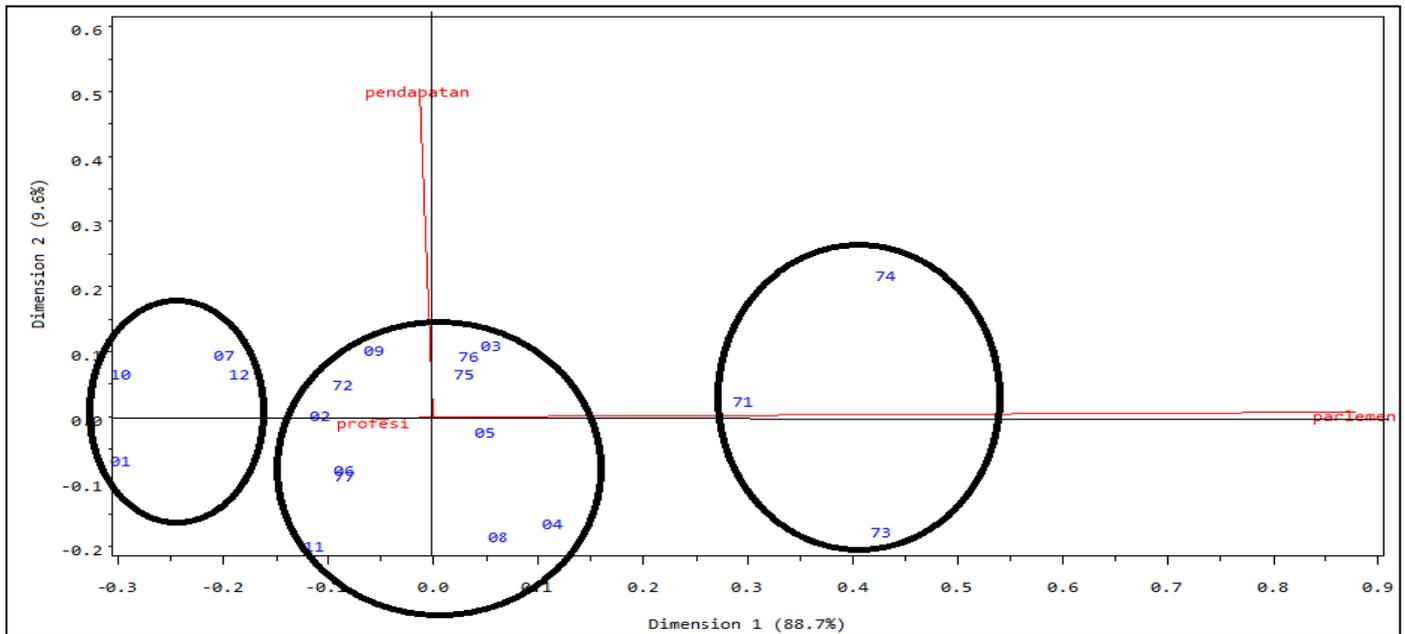
ANALISIS IDG SUMATERA BARAT MENGGUNAKAN METODE BIPLLOT

Dari data yang telah dibahas di bagian sebelumnya, kajian ini selanjutnya melakukan analisis dengan menggunakan metode biplot. Metode ini bertujuan untuk meringkas informasi dari suatu matriks data yang besar ke dalam suatu plot yang berdimensi dua. Selain menyajikan posisi relatif objek beserta variabel, metode biplot menyajikan ragam dan korelasi antarvariabel.

Sebelum memulai analisis biplot, langkah pertama yang harus terpenuhi adalah terpenuhinya asumsi normalitas untuk data *multivariate*. Dengan menggunakan uji kenormalan Q-Q Plot (*normal probability quantile-vs-quantile*) dan Mardia diperoleh *p-value* untuk *multivariate skewness* adalah 0,53 sehingga dapat disimpulkan bahwa data *multivariate* di atas tidak berdistribusi multinormal dan tidak ada pencilan (*outlier*).

Metode biplot kemudian dilakukan dengan menghitung indeks EDEP (*equally distributed equivalent percentage*) pada tiap komponen IDG. Hasil biplot berdasarkan indeks EDEP parlemen, indeks EDEP tenaga profesional, dan indeks EDEP sumbangan pendapatan, seperti yang disajikan pada Gambar 11. Bahasan berikut ini mendiskusikan beberapa aspek penting dari grafik biplot tersebut.

Gambar 11. Grafik biplot komponen IDG kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, 2015



Sumber: Olah data KPPA & BPS (2016)

Panjang Vektor

Panjang vektor menyatakan varian dari tiap variabel. Pada Gambar 11 terlihat bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen memiliki panjang vektor yang terpanjang. Dapat diartikan, keterwakilan perempuan dalam parlemen di antara ke-19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki keragaman yang tinggi, terutama di Kota Padang, Kota Sawah Lunto, dan Kota Padang Panjang. Sementara itu, sumbangan pendapatan juga memperlihatkan keragaman yang cukup tinggi dibandingkan kedudukan perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi.

Nilai Sudut Antar Dua Peubah

Besar koefisien antarvektor dapat diketahui dengan menghitung nilai *cosinus* dari sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Gambar 11 memperlihatkan bahwa vektor keterwakilan perempuan dalam parlemen dan vektor kedudukan perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, teknisi memiliki sudut tumpul ($>90^\circ$). Hal ini berarti terdapat korelasi negatif antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, vektor sumbangan pendapatan dan vektor keterwakilan perempuan dalam parlemen membentuk sudut agak lancip, yang menandakan korelasi positif antara kedua variabel tersebut.

Kedekatan Antar-Obyek

Kedekatan antar-obyek dapat digunakan sebagai dasar untuk pengelompokan. Obyek-obyek yang letaknya berdekatan diasumsikan memiliki karakteristik yang hampir sama sehingga dapat dikelompokkan ke dalam satu kelompok. Pembentukan kelompok dapat didasarkan pada jarak kedekatan dengan variabel maupun kedekatan antar-obyek. Tidak ada ketentuan seberapa jauh atau seberapa dekat jarak antar-obyek tersebut sehingga ditentukan berdasarkan persepsi saja (Gardner & Le Roux, 2002). Berdasarkan posisi kabupaten dan kota terhadap variabel yang ada, identifikasi awal terkait pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan variabel IDG, sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama meliputi Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat. Kelompok pertama ini memiliki kedekatan yang sama dan karakteristik yang hampir sama pada variabel indeks EDEP kedudukan perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi. Dapat diartikan, kelompok ini mempunyai ciri yang menonjol dalam hal masih tingginya ketimpangan gender dalam hal kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi, serta keterwakilan dalam parlemen. Hal ini disebabkan masih adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam memperoleh pekerjaan dan jabatan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat. Hal ini dapat dilakukan dengan menghapus diskriminasi di berbagai bidang dan memberi perhatian pada masalah yang dialami oleh pekerja perempuan (Uli, 2005).
- b. Kelompok kedua meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmas Raya, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Kelompok kedua ini memiliki kedekatan yang sama dan karakteristik yang hampir sama pada variabel sumbangan pendapatan perempuan dan keterwakilan perempuan dalam parlemen.
- c. Kelompok ketiga meliputi Kota Padang, Kota Sawah Lunto, dan Kota Padang Panjang. Kelompok ketiga ini memiliki kedekatan pada variabel indeks EDEP keterwakilan perempuan dalam parlemen. Salah satu ciri yang menonjol dari kelompok ini adalah lebih banyaknya keterwakilan

perempuan dalam parlemen dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Meskipun begitu, persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen di ketiga kota tersebut masih di bawah 30%.

Untuk meyakinkan apakah pembentukan kelompok sudah sesuai dan tepat dilakukan uji statistik pembentukan kelompok dengan menggunakan MANOVA (Johnson & Wichern, 2002). Hasil uji statistik yang disajikan pada Tabel 4 mengindikasikan bahwa ketiga kelompok mempunyai nilai rata-rata keseluruhan yang berbeda, sehingga pembentukan kelompok tersebut sudah sesuai.

Tabel 4. Hasil uji multivariat

| Effect | | Value | F | Sig. |
|-------------|--------------------|----------|-----------|------|
| kel_ indeks | Pillai's Trace | 1.958 | 10.019 | .000 |
| | Wilks' Lambda | .000 | 210.560 | .000 |
| | Hotelling's Trace | 2025.253 | 2850.356 | .000 |
| | Roy's Largest Root | 2017.827 | 10761.745 | .000 |

Pengukuran tingkat kesalahan pengelompokan dengan menggunakan biplot dilakukan dengan melihat nilai STRESS. Semakin kecil nilai STRESS menunjukkan semakin kecil *error* antara jarak dan nilai kemiripan dari ruang yang disajikan. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS diperoleh variabilitas komponen IDG yang dapat dijelaskan melalui metode biplot sebesar 99,94% dan nilai STRESS sebesar 15,98% yang termasuk kategori cukup sesuai.

Dari ketiga kelompok yang terbentuk, kelompok pertama harus mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah. Strategi pemerintah dalam pemberdayaan perempuan perlu dilakukan secara bertahap. Sebagai contoh, program Keluarga Berencana (KB) perlu memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum ibu untuk mengurangi beban yang dipikulnya dalam lingkungan keluarga dengan mengatur kehamilan dan kelahiran anak-anaknya. Melalui cara tersebut, perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu, kaum ibu dapat ikut serta membangun keluarga dan lingkungan, serta mengembangkan sifat dan jiwa kewirausahaan dengan ikut serta dalam gerakan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Memberikan prioritas kepada kelompok perempuan untuk mengembangkan diri dan keluarganya agar mereka kelak dapat terbebas dari ketidakberdayaan, kemiskinan, ataupun kebodohan bukanlah suatu penyelesaian dalam pemberdayaan perempuan.

Sebaliknya, perlu diberikan solusi atas permasalahan yang selama ini dirasakan oleh kaum perempuan seperti memberikan fasilitas penitipan anak yang memadai, terutama bagi kaum perempuan yang bekerja, agar mereka tenang dalam bekerja. Hal ini patut menjadi perhatian karena banyak kaum perempuan berhenti bekerja disebabkan masalah pengurusan anak. Situasi ini dapat berdampak pada kondisi perekonomian dan kesejahteraan keluarga.

Peningkatan pemberdayaan perempuan juga dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan kaum perempuan. Pendidikan perempuan dapat berdampak pada keseluruhan bangsa karena perempuan berpendidikan baik biasanya memiliki pendapatan lebih tinggi, lebih aktif secara politik, serta peduli terhadap kesehatan dan pendidikan untuk generasi selanjutnya. Selain itu, solusi lain peningkatan pemberdayaan perempuan adalah peningkatan kemampuan (keahlian) dan keterampilan perempuan dalam segala bidang. Misalnya, program pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi melalui industri rumah tangga. Pemerintah juga diharapkan dapat mengalokasikan dana pinjaman modal khusus bagi perempuan. Solusi tersebut merupakan pilihan bijak sebab sebagian besar kemiskinan di wilayah ini dialami oleh kaum perempuan. Melalui cara tersebut, pembangunan berbasis gender dapat terwujud dan tidak lagi sekadar slogan atau retorika yang tidak terealisasi. Meskipun ikhtiar pemberdayaan perempuan perlu mendapat perhatian khusus, pemberdayaan itu sendiri bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau terlepas dari *grand strategy* pembangunan nasional secara umum. Oleh karena itu, strategi yang menjadikan ikhtiar pemberdayaan perempuan perlu menjadi salah satu inti *spirit* pembangunan nasional. Situasi ini yang disebut dengan pemberdayaan perempuan berdimensi gender, yakni upaya mengembangkan kemampuan kaum perempuan agar mereka dapat menjadi mitra sejajar kaum laki-laki dalam membangun Indonesia ke depan.

KESIMPULAN

Metode biplot dalam kajian ini menghasilkan tiga pengelompokan kabupaten/kota di Sumatera Barat berdasarkan variabel-variabel komponen IDG. Kelompok pertama meliputi Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat. Karakteristik utama kelompok pertama ini adalah adanya kedekatan yang sama pada variabel indeks EDEP kedudukan perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi. Dengan kata lain, kelompok ini mempunyai ciri yang menonjol yaitu masih tingginya ketimpangan gender dalam hal kedudukan

perempuan dan laki-laki sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi, serta keterwakilan dalam parlemen. Kelompok kedua mencakup Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmas Raya, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Kelompok kedua ini memiliki kedekatan yang sama dan karakteristik yang hampir sama, yakni sumbangan perempuan dalam pendapatan dan keterwakilan perempuan dalam parlemen dalam kategori sedang. Selanjutnya, kelompok ketiga mencakup Kota Padang, Kota Sawah Lunto, dan Kota Padang Panjang. Kelompok ketiga ini memiliki kedekatan pada variabel indeks EDEP keterwakilan perempuan dalam parlemen. Salah satu ciri yang menonjol dari kelompok ini adalah lebih banyaknya keterwakilan perempuan dalam parlemen dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat. Meskipun ketiga kota tersebut memiliki proporsi penduduk perempuan cukup besar, namun persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen masih di bawah 30 persen. Pengujian lebih lanjut terhadap pengelompokan yang terbentuk dalam studi ini mengindikasikan bahwa hasil analisis tersebut cukup sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dari hasil analisis tersebut, beberapa strategi yang harus dilakukan pemerintah guna meningkatkan pemberdayaan gender di Sumatera Barat, meliputi (i) perumusan kebijakan yang responsif gender dan menghapus bentuk-bentuk diskriminasi terhadap upah dan bentuk-bentuk pekerjaan; (ii) peningkatan investasi di bidang pendidikan guna meningkatkan keahlian/kemampuan dan kualitas angkatan kerja perempuan; (iii) pengupayaan kebijakan dalam memberikan regulasi yang mewajibkan partai politik dalam anggaran dasar dan rumah tangganya untuk memberdayakan perempuan; (iv) perubahan sistem keterpilihan calon dalam pemilu menjadi sistem proporsional tertutup dengan mewajibkan partai politik memberikan keterwakilan perempuan 30% di dalam calon terpilih; serta (v) peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan, terutama perlindungan maternitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aitchison, J. & Greenacre, M. (2002). Biplots of compositional data. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 51, 375-392. Doi:10.1111/1467-9876.00275
- Cox, T.F., & Cox, M.A.A. (1994). *Multidimensional scaling*. London: Chapman & Hall.

- Gardner, S., & Le Roux, N. (2002). Biplot methodology for discriminant analysis based upon robust methods and principal curves. Dalam K. Jajuga, A. Sokolowski & H.-H. Bock (Ed.), *Classification, clustering, and data analysis*, 169-176. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Hennigusnia. (2014). Kesenjangan upah antar jender di Indonesia: Glass ceiling atau sticky floor? *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 9(2), 83-96. doi: 10.14203/jki.v9i2.37
- Jolliffe, I.T. (1986). *Principal component analysis*. New York: Springer-Verlag.
- Johnson, R.A. & Wichern, D.W. (2002). *Applied multivariate statistical analysis (5th edition)*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [KPPA] & Badan Pusat Statistik [BPS]. (2016). *Pembangunan manusia berbasis gender 2016*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa
- Miki, M. & Yuval, F. (2011). Using education to reduce the wage gap between men and women. *The Journal of Socio-Economics*, 40, 412-416. doi: 10.1016/j.socec.2011.04.006
- Noerdin, E. (2006). *Strategi mengentaskan kemiskinan berbasis gender: Potret kemiskinan perempuan*. Jakarta: Women Research Institute.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan strategi pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pirmana, V. (2006). Earnings differential between male-female in Indonesia: Evidence from Sakernas data. *Working Paper in Economics and Development Studies*, No. 200608.
- Rawlings, J.O. (1988). *Applied regression analysis: A research tool*. California, USA: Wadsworth and Brooks.
- Tuwo, A.G. (2016, 19 Mei). PBB: Tanpa langkah kuat, perlu 118 tahun atasi kesetaraan gender. *Liputan6.com*. Diakses dari <http://global.liputan6.com/read/2510965/pbb-tanpa-langkah-kuat-perlu-118-tahun-atasi-kesetaraan-gender>. Uli, S. (2005). Pekerja wanita di perusahaan dalam perspektif hukum dan jender. *Jurnal Equality*, 10(2).
- UN Women. (2016). *Regional director's opening remarks in commemoration of International Women's Day, Bangkok*. Diakses dari http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2016/03/cleared_press%20release_iwd%202016.pdf?la=en&vs=209.
- Vibriyanti, D. (2013). Ketimpangan jender dalam partisipasi ekonomi: Analisis data Sakernas 1980-2012. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 8(1), 1-16. doi: 10.14203/jki.v8i1.18
- Wahyuni, R.N.T. & Monika, A.K. (2016). Pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(1), 15-28. doi: 10.14203/jki.v11i1.63
- World Economic Forum. (2015). *The global gender gap report*. Diakses dari <http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf>